BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan serta hak-hak masyarakat yang diatur dan diakui dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kerangka otonomi, pemerintah desa memiliki wewenang dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program pembangunan desa (Irawan, 2017). Penerapan akuntansi yang baik dalam pengelolaan keuangan desa dapat memberikan peranan strategis dalam mewujudkan pembangunan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa bertujuan sebagai upaya pemerataan pembangunan sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah saat ini yaitu untuk mendongkrak pembangunan di Indonesia dengan melibatkan pengelolaan keuangan desa yang baik. Dengan adanya pembangunan desa yang merata, hasil yang dirasakan akan berdampak langsung pada kepentingan masyarakat dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki wewenang, tugas, dan kewajiban dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, hal ini disebabkan bahwa desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggara pemerintah di Indonesia (Jaro et al., 2023). Pemerintah desa bertanggung jawab atas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat guna mencapai kesejahteraan seluruh lapisan yang ada didalamnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, dana desa menjadi instrumen strategis untuk merealisasikan pembangunan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui kabupaten atau kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa yang dialokasikan di Kabupaten Gresik setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan yakni pada tahun 2022 sebesar Rp 294.720.837.000, tahun 2023 sebesar Rp 312.367.667.000 dan tahun 2024 sebesar 312.367.667.000. Dalam konteks pembangunan, dana desa dapat dipergunakan untuk membangun dan merehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat bencana alam seperti bencana banjir yang kerap terjadi di beberapa desa di Kabupaten Gresik, salah satu desa yang terdampak adalah Desa Iker Iker Geger yang terletak di Kecamatan Cerme yang menjadi langganan bencana banjir ketika musim hujan. Pada tahun 2023, Desa Iker Iker Geger melakukan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) dan peninggian jalan usaha tani (JUT) dengan merealisasikan anggaran yang direncanakan pada tahun 2022, namun terjadi kesalah pahaman terkait dengan adanya dugaan *mark up* anggaran dalam pelaksanaan pembangunan tersebut (radarjatim.co). Pada kenyataannya, pemerintah Desa Iker Iker Geger selalu merealisasikan pembangunan tersebut berdasarkan anggaran yang telah disusun pada musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbang).

Dengan melihat permasalahan tersebut, pengelolaan keuangan menjadi aspek yang krusial dalam mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan. Pengelolaan keuangan dapat menjadi upaya untuk meminimalisir terjadinya dugaan serupa yang disebabkan oleh pengelolaan dana desa yang kurang akuntabel dan transparan serta

tidak adanya komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa serta peran aktif dari masyarakat dalam penyusunan anggaran untuk pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa.

Namun, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, pengelolaan keuangan dalam melaksanakan pembangunan desa belum tentu dapat menunjukkan hasil yang optimal. Penelitian terdahulu cenderung fokus pada pengelolaan sisi administrasi tanpa melihat keterkaitan antara pengelolaan keuangan desa dengan keberhasilan pembangunan desa. Selain itu, masih sedikit penelitian yang membahas hubungan partisipasi masyarakat dengan pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan pembangunan desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan desa dan memastikan bahwa dana desa dikelola secara optimal. Pada dasarnya, akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa sebagai bagian dari entitas pengelola dana desa (Hasanah et al., 2020). Dengan demikian pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan dapat memberi dampak terhadap masyarakat desa, sehingga pengelolaan keuangan yang akuntabel dapat mewujudkan pembangunan desa yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Selain akuntabilitas, hal lain yang perlu diperhatikan adalah transparansi dalam pengelolaan keuangan tersebut. Transparansi bersifat terbuka bagi masyarakat baik dalam proses penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga

pengendalian yang dapat diakses oleh pihak yang berkaitan (Vanviora & Sari, 2023). Dengan menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, informasi terkait dengan penggunaan anggaran desa dapat diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana dana tersebut digunakan dalam pembangunan desa. Hal ini juga dapat meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan dana dalam melaksanakan pembangunan desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa tidak hanya diperlukan akuntabilitas dan transparansi, namun partisipasi masyarakat juga berperan dalam proses pembangunan desa. Partisipasi menjadi peran kunci dalam peningkatan kemampuan individu yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam pembangunan, dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan berikutnya (Hatu et al., 2024). Ketika masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, mereka akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pembangunan yang dilakukan. Keterlibatan ini dapat mendorong terciptanya program-program yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, adanya penerapan konsep tata kelola yang baik (*good governance*), diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan desa. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana konsep *good governance* dapat saling berinteraksi dan mempengaruhi pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul gagasan untuk membuat penelitian dengan judul “Analisis Tata Kelola Keuangan Desa dalam Mendukung Pembangunan Desa Iker Iker Geger Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan Desa Iker Iker Geger?
2. Bagaimana transparansi pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan Desa Iker Iker Geger?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan Desa Iker Iker Geger?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan dampak akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan Desa Iker Iker Geger?
2. Untuk menggambarkan dampak transparansi pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan Desa Iker Iker Geger?
3. Untuk menggambarkan dampak partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Desa Iker Iker Geger?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan dan penelitian selanjutnya terkait dengan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep tata kelola keuangan di tingkat pemerintah desa

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa agar lebih optimal dalam pelaksanaan pembangunan desa serta memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa.

1.5 Kesenjangan Fenomena

Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan keuangan dalam pembangunan desa. Sementara penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak hanya membahas terkait dengan pengelolaan keuangan desa tanpa fokus tertentu dalam penggunaan dana desa tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembaharuan terkait dengan pengelolaan keuangan desa khususnya pada pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.